

Guru di Portugal Unjuk Rasa karena Gaji Kecil

PORTUGAL (IM)-Puluhan ribu guru di Portugal dan staf sekolah melakukan unjuk rasa dengan meneubi jalan-jalan Ibu Kota Lisbon. Protes itu adalah salah satu yang terbesar di Portugal dalam beberapa tahun terakhir.

Para guru dan staf sekolah menuntut kenaikan gaji dan lingkungan kerja yang lebih baik. Unjuk rasa berlangsung damai yang dikoordinir oleh Union of All Education Professionals (STOP).

Demonstran membawa banner dan meneriakkan kalimat agar Menteri Pendidikan Portugal Joao Costa mengundurkan diri. Gaji guru di Portugal cukup kecil dengan bayaran sekitar 1.100 euro per bulan (Rp 18. Juta). Guru di level Kepala Sekolah bahkan mendapat bayaran kurang dari 2 ribu euro per bulan.

Mereka yang berunjuk rasa menyebut gaji saat ini terlalu rendah, khususnya sekarang ini terjadi krisis biaya hidup. "Guru berhak mendapatkan gaji yang adil karena kami pun bekerja sepanjang hidup kami. Kami tidak pernah korupsi dan

tidak pernah mencuri tidak seperti contoh buruk yang sayangnya berasal dari politikus," kata Maria Duarte (62).

Portugal dipimpin oleh Perdana Menteri Antonio Costa yang memenangkan suara mayoritas parlemen dalam pemilu setahun lalu. Namun di bawah kepemimpinannya, Portugal mengalami kesulitan. Sudah 13 menteri dan sekretaris negara yang mengundurkan diri. Beberapa tuduhan menyebut adanya salah dugaan praktik di masa lalu atau praktik-praktik yang perlu dipertanyakan.

"Akan sangat bagus bagi para pemimpin yang menyaksikan unjuk rasa ini untuk berfikir dengan hati-hati soal apa yang akan mereka lakukan berikutnya karena kami ini (unjuk rasa) punya konsekuensinya. Kami ingin ada sejumlah kebijakan yang serius untuk diambil," kata Aitor Matos (47), guru matematika.

Matos mengatakan guru di Portugal terus-menerus kehilangan pemasukannya. Beberapa dari mereka bahkan ditempatkan di sekolah-sekolah yang jauh dari rumah. ● gul



KONFERENSI PERS MENLU SURIAH FAISAL MEKDAD

Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad (ketiga dari kanan) dan rekannya dari Iran Hossein Amir-Abdollahian (ketiga dari kiri) dalam konferensi pers di Damaskus, Suriah, Sabtu (14/1). Faisal Mekdad mengatakan bahwa Turkiye harus menunjukkan "kepositifan mutlak", terutama dengan mengakhiri pendudukan atas wilayah Suriah, untuk memulihkan hubungannya dengan Suriah.

Buntut Eksekusi Mantan Wamen Iran, Inggris Akan Tetapkan IRGC Teroris

Inggris akan menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris sebagai buntut eksekusi mantan wakil menteri pertahanan Iran Alireza Akbari.

LONDON (IM) - Inggris dan Uni Eropa (UE) diharapkan untuk mengoordinasikan langkah-langkah untuk mencap Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran sebagai organisasi teroris.

Ini adalah buntut dari eksekusi dari mantan Wakil Menteri Pertahanan Iran yang memiliki kewarganegaraan ganda, Alireza Akbari, dengan tuduhan mata-mata Inggris. Keputusan formal untuk melarang IRGC baik di Inggris maupun UE pasti akan mengarah pada pembalasan Iran. Namun Menteri Keamanan Inggris, Tom Tugendhat, mengesankan bahwa langkah itu dapat dibenarkan.

"Pembunuhan negara terhadap warga negara lain menunjukkan kekejaman rezim Iran. Rezim Iran mengancam warga Inggris bahkan di Inggris, seperti yang dilaporkan kepala MI5 baru-baru ini. Kami akan mempertahankan keamanan kami," ujarnya seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (15/1).

Peninjau independen undang-undang terorisme Inggris, Jonathan Hall, dalam sebuah catatan minggu lalu memperingatkan bahwa melarang entitas Negara di bawah Undang-Undang Terorisme 2000 akan menyimpang dari kebijakan Inggris yang konsisten dan selama puluhan tahun, dan mempertanyakan definisi terorisme yang, sampai saat ini, telah terbukti praktis dan efektif".

Dia mengatakan kebijakan abadi pemerintah adalah melakukan terorisme oleh negara-negara bagian di luar Undang-Undang Terorisme 2000, menunjukkan bahwa perancangan Salisbury oleh agen-agen Rusia diperlakukan sebagai aktivitas negara yang bermusuhan, bukan terorisme.

Hall merujuk pada kasus perancangan mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal pada 2018 lalu. Namun dia menambahkan bahwa ini tampaknya merupakan posisi kebijakan daripada pandangan hukum tentang interpretasi Undang-Undang tersebut, sehingga memberikan fleksibilitas kepada para menteri Inggris untuk melarang IRGC jika mereka mau. IRGC sudah mendapat sanksi di Inggris, tetapi

beberapa dari sanksi itu akan dicabut musim gugur ini sebagai bagian dari kesepakatan nuklir.

Menanggapi eksekusi tersebut, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, mengatakan jika Ia terkejut dengan eksekusi warga negara Inggris-Iran Alireza Akbari di Iran. "Ini adalah tindakan tidak berperasaan dan pengecut, yang dilakukan oleh rezim biadab tanpa menghormati hak asasi manusia rakyatnya sendiri," katanya.

Menteri luar negeri Inggris, James Cleverly, menambahkan jika Tindakan biadab tersebut pantas mendapat kecaman sekuat mungkin. Ini tidak akan bertahan tanpa tantangan.

Akbari, yang pernah menjadi tokoh pertahanan senior dalam pemerintahan reformis hampir dua dekade lalu, digantung karena menjadi mata-mata badan intelijen Inggris MI6, tuduhan yang dibantah oleh keluarganya. Seorang teman keluarga mengatakan ini adalah kasus pembunuhan dan bersumpah untuk membuktikan bahwa pria berusia 61 tahun itu tidak bersalah, termasuk tuduhan bahwa dia telah dibayar oleh intelijen Inggris.

Akbari meninggalkan dua putri dan seorang istri yang tinggal di Inggris. Mereka diberi alasan untuk mengharapkan penangguhan hukuman di menit-menit terakhir, tetapi

istrinya membaca tentang eksekusinya di kantor berita yudisial negara Iran sebelum fajar pada Sabtu (14/1) pagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Akbari, (61), yang merupakan seorang mantan kolonel Garda Revolusi Iran, ditangkap pada 2019 setelah kembali ke Iran dari Inggris. Akbari mengatakan bahwa dia kembali ke Iran atas permintaan seorang diplomat senior negara Islam itu.

Menurut keterangan dalam video yang ditayangkan oleh kantor berita negara Iran IRNA pada Sabtu (14/1) Akbari pindah ke Inggris setelah ditahan sebentar dan dibebaskan dengan jaminan pada 2008. Reuters tidak dapat memverifikasi apakah Akbari telah pindah ke Inggris pada 2008, atau kapan dia kembali ke Iran dari Inggris.

Dalam rekaman audio yang konon dari Akbari dan disiarkan oleh BBC Persia Akbari mengatakan bahwa otoritas keamanan menekan hakim untuk mengeluarkan hukuman yang memberikan hukuman mati terhadapnya. "Pengadilan setuju untuk membebaskan saya dengan jaminan rendah tetapi Kementerian Intelijen menghentikannya. Mahkamah Agung menolak hukuman mati, tetapi Kementerian Intelijen memaksakan kehendaknya dengan mengancam hakim," kata Akbari dalam rekaman tersebut.

Akbari juga mengatakan bahwa dia mengakui tuduhan terhadapnya setelah disiksa secara ekstensif selama ribuan jam sejak penangkapannya. "Dengan lebih dari 3.500 jam penyiksaan, obat-obatan psikodelik, dan metode tekanan fisiologis dan psikologis, mereka mengambil surat wasiat saya. Mereka membawa saya ke ambang kegelapan dan memaksa saya untuk membuat pengakuan palsu dengan kekuatan senjata dan ancaman pembunuhan," katanya.

Media pemerintah Iran, yang menggambarkan Akbari sebagai mata-mata super, menyiarakan sebuah video yang mereka katakan menunjukkan dia berperan dalam pembunuhan pada 2020 terhadap ilmuwan nuklir top Iran, Mohsen Fakhrizadeh, yang tewas dalam serangan di luar Teheran yang pada saat itu dituding pihak berwenang dilakukan oleh Israel.

Eksekusi terhadap Akbari ditekankan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, yang diyakini akan memperburuk hubungan Iran dengan negara-negara Barat yang telah berada di titik rendah sejak kegagalan negosiasi perjanjian nuklir 2015.

Inggris telah memanggil Kuasa Usaha Iran, menjatuhkan sanksi pada jaksa agung Iran, dan akan sementara menarik duta besarnya dari Teheran untuk konsultasi lebih lanjut terkait eksekusi Akbari. ● tom

Mantan Presiden Rusia Suruh PM Jepang Bunuh Diri

MOSKOW (IM)-Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev memberikan pernyataan keras kepada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Ia menyuruh pemimpin pemerintahan itu untuk bunuh diri karena mengagapkannya sebagai pelayan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden.

Hal itu diungkapkan Medvedev setelah Kishida bertemu dengan Biden pada Sabtu (14/1), untuk memperkuat hubungan aliansi antara AS dan Jepang. Mereka juga berbicara mengenai potensi penggunaan senjata nuklir di Perang Ukraina.

"Kami menyatakan dengan tegas bahwa setiap penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di Ukraina akan menjadi tindakan permusuhan terhadap kemanusiaan dan tak dapat dibenarkan dengan cara apa pun," kata Kishida dikutip dari Newsweek, Minggu (15/1).

"Kami akan terus mendukung Ukraina dalam menghadapi serangan menjijikan Rusia terhadap infrastruktur penting," tambahnya.

Pernyataan itu pun dibalas

dengan keras oleh Medvedev yang saat ini menjadi Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia.

Pada pernyataannya di Telegram, Medvedev mengencang pernyataan Kishida dengan menulis bahwa PM Jepang itu telah mengkhianati memori ratusan ribu warga Jepang yang terbakar karena tembakan nuklir ke Hiroshima dan Nagasaki oleh AS pada Perang Dunia II.

"Ia seharusnya mengingatkan Presiden AS mengenai hal ini dan menuntut pertobatan, bahkan jika itu tidak dibawa oleh kepemimpinan Amerika untuk tindakan perang ini," tulisnya.

"Tapi tidak, Kishida hanya alah staf layanan untuk orang Amerika, dan pelayan tidak bisa memiliki keberanian," tambah Medvedev.

Medvedev pun menyuruh Kishida untuk melakukan Seppuku, ritual bunuh diri Jepang untuk membela kehormatan.

"Tetap merasa kasihan kepada orang Jepang. Bagaimanapun rasa malu itu hanya bisa terhapus setelah melakukan seppuku tepat di rapat kabinet mereka, meski konsep kehormatan ini tidak melekat di generasi Jepang saat ini," tuturnya.

Rusia memang belum pernah menggunakan senjata nuklir sejak melakukan invasi pada 24 Februari 2022. Tetapi kekhawatiran terkait penggunaan senjata mematikan itu terus berkembang jika ia mengalami kekalahan. ● gul

Hampir 60 Ribu Orang di Tiongkok Meninggal Akibat Covid-19 dalam Sebulan

BEIJING (IM)-Tiongkok melaporkan hampir 60 ribu kematian terkait Corona (Covid-19) dalam rentan waktu sebulan. Jumlah tersebut merupakan terbesar pertama yang dirilis oleh pihak berwenang sejak Beijing melonggarkan pembatasan kegiatan pada awal Desember.

Dilansir AFP, Minggu (15/1) laporan itu dikeluarkan pada Sabtu (14/1) waktu setempat. Pemerintah dituntut tidak melaporkan jumlah kematian akibat virus Corona sejak pelonggaran kegiatan.

Hanya belasan jumlah kematian yang tercatat secara resmi pada bulan Desember sebelum pengumuman 60 ribu dikeluarkan pada Sabtu, meski ada bukti krematorium dan rumah sakit yang dikuasai.

Seorang pejabat Komisi Kesehatan Nasional (NHC) mengatakan pada Sabtu (14/1) Tiongkok telah mencatat 59.938 kematian terkait virus Corona antara 8 Desember dan 12 Januari 2022.

Angka tersebut hanya mengacu pada kematian di fasilitas medis, dengan jumlah total kemungkinan lebih tinggi.

kepala Biro Administrasi Medis NHC, Jiao Yahui saat jumpa pers mengatakan data

tersebut mencakup 5.503 kematian yang disebabkan oleh kegagalan pernafasan langsung karena virus, dan 54.435 kematian yang disebabkan oleh kondisi yang mendasari dikombinasikan dengan Corona.

Beijing merevisi metodologinya untuk mengategorikan kematian akibat Corona bulan lalu, dengan mengatakan hanya akan menghitung mereka yang meninggal karena gagal napas yang disebabkan oleh virus. Hal ini dikritik oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yang menyebut definisi tersebut "terlalu sempit". ● ans



PRANGKO PERINGATAN TAHUN KELINCI

Seniman Tiongkok Chen Jianghong memamerkan prangko peringatan Tahun Kelinci yang dirancangnya saat peluncuran di Paris, Prancis, Sabtu (14/1).

Krisis Keuangan, Sri Lanka Pangkas Jumlah Tentara

KOLOMBO (IM) - Sri Lanka yang bangkrut secara ekonomi, akan secara drastis memangkas jumlah personel militer nya, ungkap Kementerian Pertahanan Sri Lanka, Sabtu (14/1).

Kebijakan ini diambil saat pemerintah berupaya merombak kondisi keuangan yang berantakan setelah krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Negara pulau itu masih belum pulih dari berbulan-bulan kekurangan makanan dan bahan bakar yang membuat kehidupan sehari-hari menjadi sengsara bagi 22 juta penduduknya.

Presiden Ranil Wickremesinghe telah menaikkan pajak dan memberlakukan pemotongan pengeluaran yang keras untuk memperlancar pengesahan bailout Dana Moneter Internasional yang diharapkan menyusul gagal bayar utang pemerintah. Angkatan bersenjata Sri Lanka berikutnya berada di blok pemotongan, dengan Kementerian pertahanan mengumumkan akan memensiuskan 65.000 tentara dari 200.000 tentaranya se-

lama setahun. Pemotongan tersebut merupakan bagian terbesar dari rencana untuk mengurangi pasukan darat Sri Lanka menjadi 100.000 pada akhir dekade ini.

"Tujuan keseluruhan dari cetak biru strategis adalah untuk memicarakan kekuatan pertahanan yang sehat secara teknis dan taktis dan seimbang," kata sebuah pernyataan Kementerian Pertahanan, seperti dikutip dari AFP.

Angkatan bersenjata Sri Lanka tetap membengkak lebih dari satu dekade setelah berakhirnya perang saudara etnis yang traumatis di negara itu. Hampir 400.000 orang bertugas di militer pada kekuatan puncaknya pada tahun 2009.

Itu adalah masa di mana pasukan pemerintah menumpas gerakan separatis Macan Tamil selama serangan tanpa batas yang menyebabkan ribuan korban sipil. Pertahanan menyumbang hampir 10 persen dari pengeluaran publik tahun lalu, dan menuk analisis ahli, gaji personel keamanan merupakan setengah dari tagihan gaji pemerintah. ● ans

Korea Utara Kecam Kritik Sekjen PBB Soal Nuklir

SEOUL (IM)- Korea Utara (Korut) mengancam Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres pada hari Sabtu (14/1) atas ucapannya baru-baru ini tentang program nuklir Pyongyang sebagai "bahaya yang jelas dan nyata".

Ketegangan militer di Semenanjung Korea meningkat tajam tahun lalu ketika Korut melakukan uji coba senjata penghancur sanksi hampir setiap bulan, termasuk membakar rudal balistik antar-benua (ICBM) terancang-ganda.

Pemimpin Korut Kim Jong-un baru-baru ini juga menyerukan peningkatan "eksponensial" dalam persediaan nuklir Pyongyang dan ICBM baru untuk melawan apa yang disebutnya sikap permusuhan oleh Amerika Serikat (AS) dan tetangganya Korea Selatan (Korsel).

Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis bahwa Pyongyang bertanggung jawab untuk melanjutkan pembicaraan, yang gagal pada tahun 2019 ketika negosiasi nuklir antara Kim Jong-un dan presiden AS saat itu Donald Trump gagal di Hanoi.

"Program senjata nuklir yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Republik Rakyat Demokratik Korea adalah bahaya yang jelas dan nyata, mendorong risiko dan ketegangan geopolitik ke ketinggian baru," kata Guterres pada pertemuan Dewan Keamanan tentang aturan hukum yang diketui oleh menteri luar negeri Jepang Yoshimasa Hayashi.

Menanggapi pernyataan Sekjen PBB itu, Pyongyang pada Sabtu (14/1) malam merilis pernyataan yang menuduh

Guterres memiliki standar ganda yang khas dan melakukan tindakan berbahaya yang menghancurkan kepercayaan komunitas dunia di PBB.

Pernyataan tersebut juga mengatakan Guterres mengabaikan penumpukan senjata yang sembrono oleh AS yang terus-menerus membawa segala macam serangan nuklir ke Semenanjung Korea dan wilayah tersebut. Dilansir dari Al Arabiya, Minggu (15/1), pernyataan Korut itu dikaitkan dengan Jo Chol-su, seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Pyongyang.

Jo juga menuduh Jepang tidak memiliki kualifikasi moral dan hukum untuk menjadi bagian dari Dewan Keamanan PBB karena masa perang dan masa kolonialnya.

Pernyataan Pyongyang, yang dilaporkan oleh kantor berita resmi KCNA, mengesakan kembali bahwa Korut tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya. Itu terjadi setelah Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengembargobarkan postur militer Tokyo yang ditingkatkan selama pembicaraan di Gedung Putih pada Jumat lalu.

Jepang menguncang strategi pertahanannya pada bulan Desember dengan janji untuk meningkatkan pengeluaran hingga dua persen dari PDB pada tahun 2027, menambahkan lebih banyak kemampuan dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok dan Korea Utara yang tidak dapat diprediksi. Kim Jong-un menyatakan Korea Utara sebagai negara nuklir tidak dapat diubah pada September tahun lalu. ● gul

KEHILANGAN
Telah hilang Akta Jual Beli No 590/1004-JB/KEC/1993 Nomor 821.24/SK.2861..B/Peg/1992 beralamat Cilalung Jl.Sumbawa Rt 001 Rw 005 kel Jombang Kec Ciputat Kota Tangerang Selatan Prov Banten Lt170m2 Lb 48m2